



yang terkait dalam menjalankan tugas dan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 agar hasil dari retribusi jasa penyebrangan di air dapat meningkatkan atau menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya mengatasi permasalahan pada sektor retribusi jasa usaha dengan cara pengawasan terhadap petugas lapangan, pengawasan terhadap wajib retribusi, meningkatkan infastruktur dermaga, dan penertiban terhadap wajib wajib retribusi dalam kegiatan penyebrangan baik di dermaga maupun dikapal.

## 6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Di Air Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran kepada pengguna jasa penyebrangan untuk memenuhi kewajibannya atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Melalui Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi pihak ketiga.
2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib retribusi, diharapkan dengan hal ini dapat mendorong wajib retribusi untuk membayar retribusi sesuai dengan tarif yang ditentukan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dapat memberikan peluang kepada daerah untuk menambah penerimaan uang daerah khususnya Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi lebih maksimal dalam melakukan penertiban agar wajib retribusi memiliki tiket ketika hendak menyebrang.
5. Melakukan pengawasan terhadap wajib retribusi agar tetap mengikuti prosedur-prosedur yang ada di program-program pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi.
6. Dengan dibangunnya dermaga II yang tidak dapat digunakan agar segera diperbaiki supaya aktivitas penyebrangan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi antrian saat kapal berlabuh di dermaga.
7. Kepada wajib retribusi agar dapat mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh DISHUB agar retribusi jasa usaha penyebrangan ini dapat membantu meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis.